

Nomor : 130/HM.00.02/SP/08/2024
 Tanggal : 27 Agustus 2024

**PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024:
BULUKUMBA MASUK RAWAN TINGGI PADA PILKADA 2024**

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kabupaten Bulukumba pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masuk dalam kategori rawan tinggi Bersama 84 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Hal ini terekam dari hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang dipublikasikan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 26 Agustus 2024. Peristiwa yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu lalu berpengaruh terhadap kerawanan dalam Pemilihansaat ini.

Hasil pemetaan kerawanan tersebut di ukur pada tiga tahapan yakni pencalonan, kampanye dan pungut hitung, setiap tahapan memiliki kerawanan yang harus segera diantisipasi. Kerawanan Pemilihan juga disumbang oleh kondisi Sosial Politik yang terjadi pada level Nasional hingga Daerah.

Pada Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini, di tingkat Kabupaten/Kota, Tahapan Pungut Hitung menjadi tahapan yang paling rawan pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024, setelah itu tahapan kampanye dan tahapan pencalonan.

Kabupaten Bulukumba secara umum menempati urutan ke 5 rawan tinggi dari 84 Kabupaten/Kota di Indonesia yang masuk dalam rawan tinggi, sementara untuk kerawanan tahapan, Bulukumba masuk rawan tinggi pada tahapan pencalonan.



PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA RAWAN TINGGI

KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA
KABUPATEN MALANG	KABUPATEN RAJA AMPAT	KABUPATEN BIMA	KOTA GORONTALO	KABUPATEN KONAWE SELATAN
KABUPATEN FAKFAK	KABUPATEN MELAWI	KOTA BIMA	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	KOTA JAMBI
KABUPATEN PINRANG	KABUPATEN PESISIR BARAT	KABUPATEN SLEMAN	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN CIREBON
KABUPATEN BANGKALAN	KABUPATEN LUWU	KABUPATEN SIDOARJO	KOTA SUKABUMI	KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KABUPATEN BULUKUMBA	KABUPATEN AGAM	KOTA PALOPO	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	KABUPATEN NIAS BARAT
KOTA BAUBAU	KABUPATEN MAROS	KABUPATEN WAJO	KABUPATEN PURWOREJO	KOTA SORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	KABUPATEN LAMONGAN	KOTA TUAL	KABUPATEN MIMIKA
KABUPATEN BANYUMAS	KOTA SAMARINDA	KABUPATEN SAROLANGUN	KABUPATEN BONTANG	KABUPATEN DOGIYAI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH	KABUPATEN KUTAI BARAT	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN CIAMIS	KABUPATEN PANIAI
KOTA BALIKPAPAN	KOTA SALATIGA	KABUPATEN LAHAT	KABUPATEN TABALONG	KABUPATEN PUNCAK JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	KABUPATEN KUPANG	KABUPATEN PUNCAK
KABUPATEN MAJENE	KABUPATEN BOJONEGORO	KABUPATEN PASAMAN BARAT	KABUPATEN WAY KANAN	KABUPATEN NABIRE
KABUPATEN SOLOK SELATAN	KABUPATEN PANDEGLANG	KABUPATEN SIKKA	KOTA MALANG	KABUPATEN INTAN JAYA
KABUPATEN TAKALAR	KOTA AMBON	KABUPATEN PASER	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	KABUPATEN TASIKMALAYA	KOTA TANJUNGPINANG	KOTA DUMAI	KABUPATEN PESAWARAN
KABUPATEN BANDUNG	KABUPATEN BARRU	KABUPATEN LEBAK	KABUPATEN MALAKA	KOTA DEPOK
KABUPATEN SARMI	KABUPATEN SIMEULUE	KABUPATEN LEBAK	KABUPATEN BLITAR	KABUPATEN BERAU

Sebelum kerawanan dirilis oleh Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten/Kota diminta memetakan kerawanan berdasarkan kejadian (indicator), total ada 26 indikator kerawanan yang dipetakan, pada prinsipnya semakin banyak kejadian (indikator) maka semakin tinggi kerawanan suatu wilayah.

Pada tahapan pencalonan kerawanan dipengaruhi oleh potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon unsur petahana, ASN, TNI dan Polri seperti melakukan rotasi jabatan. Kerawanan pada tahapan kampanye disumbang oleh potensi praktik politik uang, pelibatan aparatur pemerintah (ASN, TNI dan POLRI), penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan konflik antar peserta dan pendukung calon.

Sementara kerawanan pada tahapan pungut hitung disumbang oleh beberapa isu yang berpotensi terjadi berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Beberapa diantaranya adalah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan adhoc, pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan.

Selain itu, potensi Kerawanan pada ketiga tahapan tersebut juga dipengaruhi oleh konteks sosial politik pada level Nasional hingga Daerah. Hal yang paling mempengaruhi kerawanan pada konteks sosial politik adalah potensi adanya intimidasi, ancaman dan kekerasan secara verbal dan fisik antar calon, antar pemilih maupun calon/pemilih kepada penyelenggara Pemilihan.

Terkait kerawanan yang telah dirilis tersebut dan menempatkan Bulukumba pada rawan tinggi, Bakri berpendapat jika kerawanan tersebut menjadi alat ukur deteksi dini untuk lebih memaksimalkan pencegahan pelanggaran.

Masyarakat tidak perlu panik atas masuknya Bulukumba sebagai daerah rawan tinggi karena setiap penyelenggaraan kontestasi selalu masuk rawan tinggi, misalkan di Pemilu tahun 2024 juga masuk rawan tinggi. Namun alhamdulillah, dengan adanya IKP ini menjadi atensi bersama untuk dilakukan mitigasi secara bersama-sama.

Langkah antisipasi dan pencegahan tentu harus dimaksimalkan, tidak hanya penyelenggara Pemilu, namun semua pihak seperti peserta Pemilihan, Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, hingga masyarakat bersama-sama mengawal dan mensukseskan Pemilihan dengan baik.

Kolaborasi bersama semua pihak baik penyelenggara Pemilu, pemerintah, Kepolisian, TNI, peserta Pemilihan dan masyarakat dalam mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dibangun dengan baik demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan di Bulukumba.

Pihaknya mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan dan akan memaksimalkan pencegahan khususnya pada isu yang rentan terjadi seperti Netralitas ASN dan Penyelenggara Pemilihan, Praktik Politik Uang, Polarisi Masyarakat dan Dukungan Publik, Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi, isu keamanan, kompetensi penyelenggara adhoc, hak memilih dan dipilih, layanan kepada pemilih, distribusi logistik, perselisihan hasil pemilihan serta kebijakan pemilihan yang berubah.

Penyelenggaraan Pilkada di Bulukumba menjadi tanggung jawab bersama, oleh karena menjadi kewajiban untuk kita sukseskan Bersama.

Humas Bawaslu Bulukumba